

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN MODAL USAHA
KELOMPOK (PMUK) PADA KELOMPOK TANI SERBA
USAHA DI KELURAHAN BATIPUAH PANJANG
KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG**

OLEH

**UNUN HASANAH
NO. BP 03 114 048**

SKRIPSI

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA PERTANIAN**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN MODAL USAHA
KELOMPOK (PMUK) PADA KELOMPOK TANI SERBA
USAHA DI KELURAHAN BATIPUAH PANJANG
KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penyaluran dan pengawasan dana PMUK oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (Dipertanhut) Kota Padang dan menganalisis pengelolaan dan dampak pemberian dana PMUK terhadap peningkatan pendapatan usahatani padi sawah. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2008 sampai dengan Januari 2009 di kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tangah. Penelitian ini merupakan studi kasus yang diambil sampelnya secara survey. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan kuesioner pada perani, responden dan informan kunci. Data dianalisis secara deskriptif, deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa secara umum pelaksanaan penyaluran dan pengawasan dana PMUK oleh Dipertanhut Kota Padang sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis, namun dalam hal pembinaan dan pengendalian dana belum sepenuhnya sesuai dengan Petunjuk Teknis. Pihak Dinas hanya mengawasi pelaksanaan penyaluran dana sampai ke kelompok.

Pengelolaan dana PMUK oleh kelompok tani Serba Usaha secara umum sudah "baik" dengan ketentuan naskah Surat Kerjasama antara pihak Dinas dan kelompok. Dana saprodi dan alsintan yang dikelola oleh kelompok sudah dapat dimanfaatkan setiap kali musim tanam. Namun perguliran dana masih terjadi pada individu di dalam kelompok dan pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan seperti jumlah dan jenis saprodi yang direalisasikan.

Pendapatan usahatani per hektarnya dan pendapatan petani sebelum dan setelah program tidak berbeda nyata setelah diuji secara statistik walaupun telah meningkatkan produksi perhektarnya dengan selisih sebelum dan sesudah program 585 Kg/Ha. Pendapatan yang relatif tidak berbeda ini, disebabkan penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan anjuran dan teknologi yang digunakan oleh petani relatif sama saat sebelum dan sesudah program.

Diharapkan kepada pihak Dinas agar memberikan pilihan-pilihan yang realistis kepada petani dalam menentukan kebutuhan jenis dan jumlah bantuan yang akan diberikan dan kepada kelompok tani agar dapat mengoptimalkan bantuan dana.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional, sektor pertanian pangan menempati prioritas penting. Peranan sub sektor pertanian pangan secara meyakinkan telah memberikan andil yang cukup besar, bukan saja terhadap ketahanan pangan tetapi juga terhadap perekonomian nasional. Pembangunan tanaman pangan ke depan dihadapkan pada tantangan dan persaingan pasar yang semakin kuat sejalan dengan era globalisasi dan perdagangan bebas serta perubahan lingkungan strategis lainnya yang secara langsung dan tidak langsung akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan tanaman pangan (Dinas Pertanian, 2006).

Berangkat dari paradigma baru pembangunan yang lebih merencanakan pada upaya pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seyogyanya harus dapat mewujudkan bentuk partisipasi masyarakat tersebut, baik kegiatan yang secara langsung ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat maupun program pembangunan sosial dan ekonomi lainnya.

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang menentukan adanya perubahan pola manajemen pembangunan dari pelaksanaan program menjadi fasilitator, akselerator dan pengendali pelaksanaan program. Disini terlihat bahwa masyarakat merupakan subjek dari pembangunan, mereka yang menentukan yang terbaik untuk dilaksanakan di daerahnya sekaligus mereka juga yang menilai hasil pembangunan tersebut sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator.

Untuk mendukung proses perubahan tersebut, maka peran pemerintah yang dapat dilakukan antara lain melalui : (1) fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian serta lingkungan usaha secara luas; (2) fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah; (3) untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta

merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha; serta (4) penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pembangunan pertanian (Dinas Pertanian, 2005).

Sesuai dengan perkembangan pemerintah kini telah lebih cenderung memfasilitasi masyarakat tani untuk memecahkan persoalannya. Pemerintah juga tidak membantu seluruh komponen usahatani tapi mengajak petani untuk melengkapi bantuan partisipasi aktif, pemerintah lebih banyak mendorong lahirnya wadah-wadah yang dapat menjadi titik temu permasalahan yang terkait dengan berbagai elemen (Dinas Pertanian, 2005). Selama ini masyarakat lebih banyak berperan sebagai penerima (objek) kegiatan pembangunan, sementara yang lebih berperan dalam pelaksanaan pembangunan adalah pemerintah. Hal ini menyebabkan ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pemerintah.

Pada masa yang akan datang kondisi seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi karena selain kurang mendidik masyarakat, dana pembangunan juga terbatas. Salah satu pengembangan ekonomi masyarakat yaitu melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), yang dananya dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Kebijakan ini dilaksanakan guna, (1) meningkatkan kemampuan permodalan kelompok tani dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip ekonomis; (2) meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan pendapatan petani; (3) mau dan mampunya kelompok tani menerapkan teknologi secara berkelanjutan (Dipertanhut, 2006).

Dana yang disalurkan kepada kelompok merupakan penguatan modal yang perlu dipupuk menjadi modal kelompok dan selanjutnya digulirkan kepada kelompok lain yang ditunjuk setelah usaha kelompok yang bersangkutan mandiri. Dengan demikian anggota kelompok tidak memperolehnya secara cuma-cuma, namun mereka harus mengembalikan dengan cara/pola pengembalian.

Program PMUK ini ditujukan untuk mendorong gerakan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan usaha yang mempunyai potensi dan mempunyai prospek bagus dalam kegiatan ekonomi secara luas serta diharapkan nantinya akan tercipta usaha kelompok tani mandiri dan juga pengembangan kawasan tanaman padi dalam menunjang pusat perekonomian daerah.

Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan kota Padang mengalokasikan dana untuk PMUK dimaksud diatas yang penggunaannya adalah untuk komoditi padi. Sasaran kelompok penerima bantuan ini adalah kelompok tani yang berusaha tani padi sawah dan berada pada kawasan pengembangan Peningkatan Mutu Intensifikasi Padi. Bantuan ini merupakan stimulan atau perangsang bagi anggota kelompok untuk pengembangan usahanya. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas padi dan meningkatkan pendapatan kelompok tani.

1.2 Rumusan Masalah

Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan bantuan PMUK dilakukan guna mengatasi masalah utama ditingkat usahatani yaitu keterbatasan modal petani di samping masalah belum berkembangnya usaha di hulu, hilir dan jasa penunjang dalam pembangunan pertanian dan rendahnya penguasaan teknologi serta lemahnya SDM dan kelembagaan petani. Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui penguatan modal usaha kelompok adalah meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku usaha pertanian maka Departemen Pertanian melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumatera Barat menerapkan pola pemberdayaan dengan PMUK yang dananya dari APBN.

Pembinaan dan pengembangan tanaman pangan dimaksudkan untuk komoditi padi dan palawija. Pada tahun 2006 di Sumatera Barat tersedia dana untuk penguatan modal sebesar Rp 1.816.754.000 dan dari jumlah dana tersebut Rp 1.820.000.000 dialokasikan untuk tanaman padi. Disini terlihat bahwa pengembangan diprioritaskan untuk tanaman padi (Lampiran 1).

Padi merupakan salah satu tanaman pangan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia terutama di Sumatera Barat. Sebagian besar penduduk Sumatera Barat mengkonsumsi beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Propinsi Sumatera Barat merupakan daerah penghasil padi di Indonesia dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan produksi (Lampiran 2).

Terdapat 6 kabupaten/kota yang mendapat PMUK untuk tanaman padi yaitu Pasaman, Padang Pariaman, Solok, Sawahlunto, Sijunjung, Pesisir Selatan,

dan Kota Padang. Dari laporan perkembangan yang diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kota Padang merupakan daerah dengan produktivitas paling tinggi dengan produktivitas 72,85 dan sudah melakukan perguliran dana untuk musim tanam berikutnya, sedangkan daerah lain masih dalam proses pengembalian karena keterlambatan musim tanam (Lampiran 3).

PMUK di kota Padang dilaksanakan di kawasan pusat pertumbuhan 500 Ha dengan jumlah dana Rp 280.000.000 dengan tiga kecamatan yaitu (1) kecamatan Koto Tengah (200 Ha) terdiri dari enam kelompok tani; 2) kecamatan Kuranji (200 Ha) terdiri dari enam kelompok tani; dan (3) kecamatan Pauh (100 Ha) terdiri dari 2 (dua) kelompok tani (Lampiran 4). Kecamatan Koto Tengah dan kelompok tani Serba Usaha merupakan kecamatan dan kelompok tani yang mendapat dana PMUK paling banyak (Lampiran 5).

PMUK digunakan untuk membiayai sarana dan fasilitas kelompok yaitu 60% untuk sarana produksi seperti benih/bibit, pupuk, pestisida dan 40% untuk alsintan (alat mesin pertanian). Dari hasil pra-survey dan wawancara dengan pihak Dinas dan kelompok tani Serba Usaha bahwa PMUK sangat membantu petani dalam hal penyediaan modal dan dapat mengembangkan usaha jasa dari kegiatan Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA). Kelompok tani Serba Usaha juga melakukan pemupukan modal dari kegiatan UPJA. Dana yang sudah dipupuk sekitar Rp 10.000.000 yang rencananya akan diinvestasikan kembali dalam bentuk alsintan yang lebih tepat guna dan perkembangan usaha jasa kelompok.

Dalam naskah kerjasama (kontrak kerja) PMUK bahwa pengembalian dana sarana produksi dikembalikan setelah satu kali panen ke rekening kelompok kemudian dapat dipergunakan kembali pada musim tanam berikutnya. Dana dikembalikan ke rekening Dinas setelah dua kali panen untuk kemudian dapat digunakan dengan pengajuan proposal kembali oleh kelompok. Dari wawancara yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Padang semua kelompok tani tidak menjalani mekanisme pengembalian dana tersebut. Hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi yang menyatakan bahwa bantuan PMUK diberikan secara cuma-cuma ke kelompok, tidak digulirkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam pedoman umum juga dinyatakan, salah satu titik

tahapan kritis yang perlu diperhatikan dalam program ini adalah pemupukan modal, perguliran dana dan pemanfaatan dana oleh kelompok

Dari pembahasan diatas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran, pemanfaatan, pengawasan dana PMUK serta pengaruh bantuan PMUK terhadap pendapatan usahatani. Dari rumusan masalah diatas maka munculah pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian dan pengawasan dana PMUK dari Dipertanhut ke kelompok tani.
2. Bagaimana proses pengelolaan dana PMUK oleh kelompok tani.
3. Bagaimana pengaruh PMUK terhadap peningkatan pendapatan usahatani.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Pelaksanaan Program Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) pada Kelompok Tani Serba Usaha Kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang"**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan mekanisme pemberian dan pengawasan dana PMUK dari Dipertanhut ke kelompok tani
2. Menganalisis proses pengelolaan dana PMUK oleh kelompok tani
3. Menganalisis pengaruh pemberian dana PMUK terhadap peningkatan pendapatan petani dari usahatani padi sawah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat eberikan masukan kepada pengambil kebijakan untuk penyusunan dalam melakukan program yang serupa di masa yang akan datang agar lebih baik. Penelitian ini juga memberikan masukan kepada kelompok tani Serba Usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana program pemerintah khususnya fasilitas dana bantuan PMUK demi kemandirian dan keberlanjutan usahatannya sehingga dapat menjangkau kelompok lain.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Hasil Penelitian

4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Kecamatan Koto Tangah merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah administratif kota Padang dengan luas daerah 232,25 Km² terdiri dari 13 kelurahan yaitu Dadok Tunggul Hitam, Air Pacah, Lubuk Minturun, Koto Panjang Ikur Koto, Bungo Pasang, Parupuk Tabing, Pasir Nan Tigo, Batang Kabung, Koto Pulai, Batipuah Panjang, Balai Gadang, Lubuk Buaya dan Padang Sarai. Kecamatan Koto Tangah yang terletak 5 Km dari ibu kota Padang, berbatasan dengan kabupaten Padang Pariaman di Utara, di selatan dengan Padang Utara dan kecamatan Nanggalo, di Timur berbatasan dengan kabupaten Solok dan kecamatan Pauh dan di Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kecamatan Koto Tangah merupakan salah satu kecamatan terluas di kota Padang yang secara geografis tersebar mulai dari daerah pantai sampai daerah perbukitan. Ketinggian kecamatan Koto Tangah berkisar 100 m dari permukaan laut. Daerah ini memiliki suhu rata-rata 22^oC-31,7^oC dengan curah hujan 384,88 mm/bulan (BPS, 2007).

4.1.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari BPS tahun 2007, jumlah penduduk kecamatan Koto Tangah sebanyak 11.661 jiwa terdiri dari 5.783 jiwa penduduk laki-laki dan 5.783 perempuan (Tabel. 4). Dari jumlah tersebut, terdapat 38.348 KK dengan kepadatan penduduk 680 jiwa/Km. Penduduk umur 0-14 tahun berjumlah 51.832 jiwa, umur 15-29 berjumlah 46.747 jiwa, umur 30-44 tahun berjumlah 33.578 jiwa, umur 45-59 tahun berjumlah 18.100 jiwa, dan umur 60 tahun ke atas berjumlah 7.699 jiwa. Dari semuanya, penduduk usia produktif berjumlah 98.425 jiwa. Diketahui bahwa penduduk usia produktif mendominasi kondisi demografi di kecamatan Koto Tangah dengan persentase 50,85%, dibandingkan usia anak-anak 52,81% dan nonproduktif 16,32.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CP/CL), proses penetapan kelompok, mekanisme penyaluran dana PMUK, pencairan dana bantuan dana PMUK sudah sesuai namun dalam sistem pembinaan dan pengendalian dana belum sesuai antara Petunjuk Teknis dengan pelaksanaan. Pihak Dinas tidak melakukan pengendalian dana dan pembinaan secara berkelanjutan sehingga kelompok dapat mengembangkan usaha secara mandiri. Pihak Dinas hanya mengawasi pelaksanaan penyaluran dana sampai ke kelompok dan dalam hal pengendalian dana, pihak Dinas tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap pemanfaatan dan pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Dari hasil tanggapan informan kunci yang dianalisis mulai dari proses pemanfaatan dan pertanggungjawaban, sistem pengembalian dan perguliran dana sudah baik antara ketentuan surat kerjasama dengan pelaksanaan di lapangan. Dana PMUK yang dimanfaatkan oleh kelompok tani Serba Usaha sudah terjadi pemupukan dan perguliran modal. Dana saprodi sudah berputar selama 5 kali musim tanam Namun perguliran dana masih terjadi pada individu di dalam kelompok dan pemanfaatan dana tidak sesuai dengan perencanaan seperti jumlah dan jenis saprodi yang direalisasikan.
3. Terjadi peningkatan pendapatan petani sebelum program Rp 9.351.292 menjadi Rp 11.057.606 setelah program. Dari perhitungan statistik uji dengan taraf uji 5% diketahui bahwa H_0 diterima, artinya tidak ada perbedaan secara nyata, antara pendapatan saat sebelum program dengan pendapatan setelah program. Diketahui t hitung -2.02 berada diantara *tabel* (2.131) dan *tabel* (-2.131) . Sehingga disimpulkan bahwa program ini belum berhasil karena pengaruh pemberian kredit tidak memberikan peningkatan pendapatan usahatani padi sawah.

DAFTAR PUSTAKA

- AAK. 1990. *Budidaya Tanaman Padi*. Kanisius. Yogyakarta.
- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif. PEMBARUAN*. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Sumatera Barat dalam Angka 2007*. Sumatera Barat. Padang.
- _____. 2007. *Koto Tangah dalam Angka 2007*. Sumatera Barat. Padang.
- Departemen Pertanian. 2006. *Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Pertanian melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok*. Jakarta. 1 hal.
- Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Padang. 2006. *Petunjuk Teknis Program Bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok*. Padang. 4 hal.
- Den Ban, Van dan Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius Yogyakarta.
- Djamali, Abdoel A. 2000. *Manajemen Usahatani*. Buku Pegangan. Politeknik Pertanian Negeri Jember. Jember.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pasaman. 2005. *Petunjuk Teknis Program Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat*. Pasaman. 10 hal.
- Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumatera Barat. 2006 *Petunjuk Pelaksana Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi*. Padang. 1 hal.
- Fajriani. 2009. *Prospek Pengembangan Usahatani Padi Sawah Organik Metode SRJ di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan*. Skripsi Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- Farida, dkk. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta. PT Rhineka Cipta.
- Febriyanti. 2007. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Jagung*. Skripsi Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- Hadisapoetro, S. 1973. *Biaya dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah dan Usahatani Ikan*. Departemen Ekonomi Pertanian. Faperta UGM. Yogyakarta.
- Hernanto, Fadholi. 1983. *Pengantar Ilmu Usahatani*. PT Gramedia. Jakarta.
- Mosher, A.T. 1987. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. CV YASAGUNA. Jakarta.